BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang berpotensi tinggi terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi serta bencana lainnya. Potensi ini disebabkan oleh beberapa faktor alamiah dan non alamiah; termasuk kondisi geografis, geologi, iklim, serta pengaruh aktivitas lainnya. Berikut merupakan data terjadinya bencana di Jawa Barat di tahun 2021 hingga 2023.

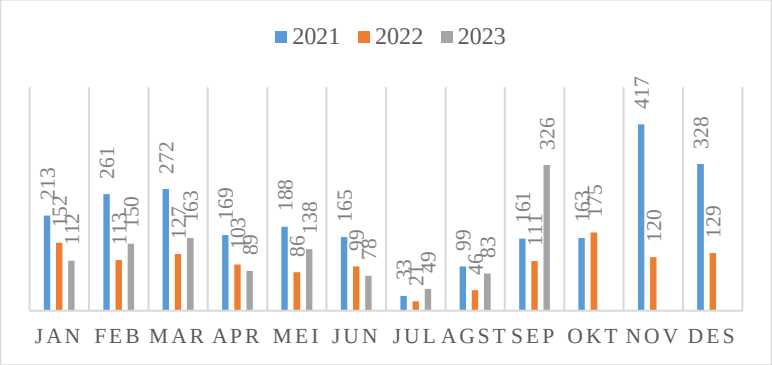

Gambar I. 1 Data Terjadinya Bencana di Jawa Barat Tahun 2021-2023

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah bencana di wilayah Jawa Barat masih tinggi. Dari bencana yang terjadi ada ancaman kebencanaan di Jawa Barat berdasarkan kejadian bencana seperti pada Gambar 1.2 berikut.

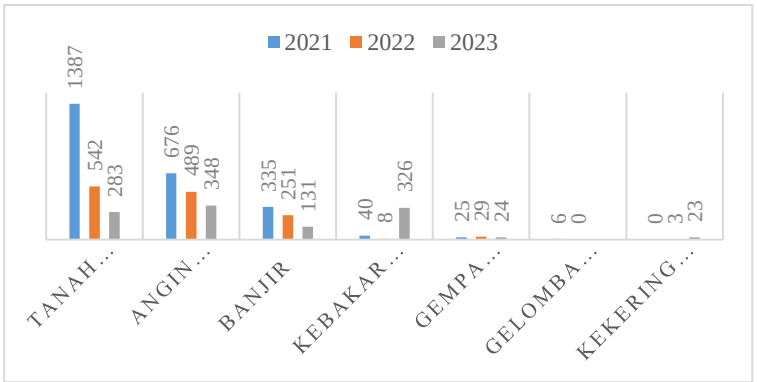

Gambar I. 2 Ancaman Kebencanaan di Jawa Barat Tahun 2021-2023

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat

Pemahaman mengenai frekuensi dan dampak bencana ini sangat penting untuk menentukan kebutuhan dan efektivitas penanggulangan bencana. Di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk penanggulangan bencana ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Jawa Barat merupakan sebuah Lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara langsung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Jawa Barat memiliki beberapa bidang, salah satunya yaitu bidang kedaruratan dan logistik. BPBD memiliki peran krusial dalam mitigasi, respons, dan rehabilitasi bencana. Bidang kedaruratan dan logistik tersebut harus menetapkan indeks kinerja agar dapat membantu mengukur seberapa efektif BPBD dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut dan mengelola sumber daya khususna bidang kedaruratan dan logistik. Penelitian sebelumnya sudah melakukan pengukuran kinerja terhadap bidang kedaruratan dan logistik BPBD Provinsi Jawa Barat. Penelitian sebelumnya melakukan pengukuran kinerja dengan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan dan digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja baik aspek keuangan maupun non-keuangan. Hasil dari penelitian sebelumnya terhadap kinerja bidang kedaruratan dan logistik Provinsi Jawa Barat yaitu seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel I. 1 KPI Usulan Penelitian Sebelumnya

Sumber : Aprialdy (2023)

Perspektif	**Sasaran Strategi**	**KPI Usulan**
Peneriman Manfaat	Atribut Produk	Kualitas produk yang diberikan
		Kecukupan produk yang diberikan
	Atribut Layanan	Kecepatan pengiriman
		Memberikan bantuan berkelanjutan

Tabel I. 1 KPI Usulan Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

Perspektif	Sasaran Strategi	KPI Usulan
Proses Bisnis Internal	Manajemen Persediaan	Kepatuhan Stok
	Pelatihan dan Pengembangan	Jumlah pelatihan pegawai
Proses Bisnis Internal	Menjangkau daerah bencana	Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat kejadian setelah bencana
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Layanan Rehabilitasi	Jumlah pegawai layanan rehabilitasi
	Kerugian dalam organisasi	Rata-rata peralatan yang hilang
Keuangan	Manajemen Biaya	Biaya transportasi
		Biaya pergudangan
	Pengangguran	Persentase stok barang yang tidak digunakan setelah bencana
Pembelajaran dan Pertumbuhan	Inovasi teknologi	Perangkat teknologi baru yang dimiliki dalam satu tahun terakhir

Tabel I. 1 KPI Usulan Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

Perspektif	**Sasaran Strategi**	**KPI Usulan**
Pembelajaran dan Pertumbuhan	Inovasi teknologi	Perangkat teknologi baru yang dimiliki dalam satu tahun terakhir
	Kerjasama tim	Jumlah tim penelitian dan penyelamatan
	Pembelajaran yang dipelajari	Pelajaran yang diambil dari bencana untuk perencanaan masa depan
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kabupaten yang mempunyai sistem penanggulangan bencana di Jawa Barat
		Jumlah SDM atau pegawai Bidang Kedaruratan dan Logiatik

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan dalam laporan kinerja wajib dinilai secara luas untuk menentukan pencapaian organisasi dalam keberhasilan memenuhi masyarakat. Untuk sekarang ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Jawa Barat melakukan pengukuran hanya bergantung pada rencana strategis (Renstra). Hal tersebut masih kurang kuat apabila digunakan untuk melakukan pengukuran. Berikut merupakan rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Jawa Barat bidang kedaruratan dan logistik tahun 2018-2023.

Tabel I. 2 RENSTRA BPBD Bidang Kedaruratan dan LOGISTIK 2023

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang Kedaruratan dan Logistik Tahun 2018-2023	
Sasaran Strategis	KPI
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Prosiding Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

Tabel I. 2 RENSTRA BPBD Bidang Kedaruratan dan LOGISTIK 2023

(Lanjutan)

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang Kedaruratan dan Logistik Tahun 2018-2023	
Sasaran Strategis	KPI
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosiding Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas.
	Prosiding Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
	Prosiding Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
	Prosiding Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), diketahui bahwa kunci keberhasilan di bidang kedaruratan dan logistik yaitu tidak adanya korban jiwa saat terjadi bencana dan terpenuhinya kebutuhan logistik. Namun nyatanya hal tersebut masih terjadi. Untuk itu diperlukan evaluasi kinerja BPBD untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanggulangan bencana. Indeks kinerja dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai area yang perlu diperbaiki dan aspek yang sudah berjalan. Pengembangan indeks kinerja memerlukan penetapan indikator dan standar yang relevan. Pengembangan indeks kinerja ini mencakup pengukuran aspek-aspek seperti, kesiapan, respon, koordinasi, dan pemulihan benacana. Dengan adanya indeks kinerja, bidang kedaruratan dan logistik BPBD Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan data tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik, merancang strategi mitigasi yang lebih efektif, dan mengoptimalkan alokasi anggaran.

Melakukan pengukuran indeks kinerja tersebut membutuhkan alat ataupun metode yang digunakan. *Analytical Hierarchi Process* (AHP) metode tersebut

biasa digunakan dalam melakukan perencanaan model indeks kinerja di bidang kedaruratan dan logistik Badan Penanggunalan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Jawa Barat.

Berikut ini merupakan diagram keterkaitan kebutuhan yang dialami bidang kedaruratan dan logistik BPBD provinsi Jawa Barat yang antara lain sebagai pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Jawa Barat hanya mencakup aspek peneriman manfaat dan pengukuran hanya berdasarkan rencana strategis (renstra).

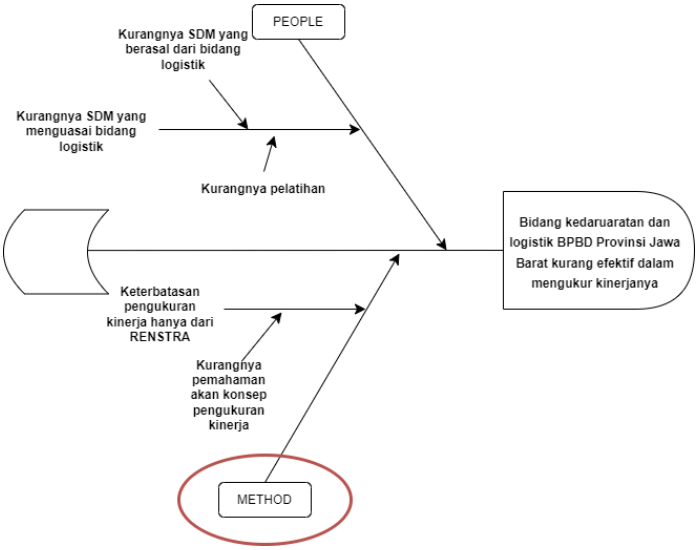

Gambar I. 3 *Fishbone*

Fishbone diagram terbagi menjadi tiga aspek permasalahan akibat belum sesuainya pengukuran kinerja di Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, berdasarkan:

1. People (Manusia)
    - Kurangnya SDM yang berasal dari bidang logistik.
    - Kurangnya pelatihan.
2. Method (Metode)
    - Kurangnya pemahaman akan konsep pengukuran kinerja.

Berdasarkan aspek-aspek di atas yang telah diuraikan, maka timbul masalah pada pengukuran kinerja di Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat dalam beberapa aspek.

I.2 Alternatif Solusi

Berikut merupakan alternatif solusi berdasarkan akar masalah pada penelitian ini untuk mengetahui solusi pada setiap akar masalah yang dilihat pada tabel berikut.

Tabel I. 3 Alternatif Solusi

NO	Akar Masalah	Solusi	Referensi
1	Kurangnya SDM yang menguasai bidang logistik	Perlu adanya syarat minimal Pendidikan sarjana pada calon pegawai BPBD Provinsi Jawa Barat dan diperlukannya pelatihan secara berkala untuk melatif kemampuan para pegawai terutama mengenai lohistik. Pelatihan ini difokuskan untuk pegawai bidang kedaruratan dan logistik, BPBD Provinsi Jawa Barat.	(Yasin, 2021)
2	Keterbatasan pengukuran kinerja hanya dari RENSTRA	Perlu dilakukannya pengukuran kinerja dimana nilai akhir yang didapatkan menjadi bahan efaluasi untuk kinerja-kinerja selanjutnya. Metode *Analytical Hierarchi Process* (AHP) merupakan metode yang cocok untuk melakukan pengukuran kinerja yang mendapatkan niai akhir.	(Widodo & Alamsyah, 2019)

Untuk melakukan pencarian solusi yang tepat terhadap permasalahan yang penulis angkat, alternatif tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikannya.

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan untuk tugas akhir ini yaitu "Bagaimana cara melakukan keefektifan dalam kinerja bidang kedaruratan dan logistik, BPBD Provinsi Jawa Barat?"

I.4 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Menentukan nilai bobot kinerja bidang kedaruratan dan logistik, BPBD Provinsi Jawa Barat.
2. Menentukan skor kepentingan dari setiap kriteria yang ada pada bidang kedaruratan dan logistik, BPBD Provinsi Jawa Barat.

I.5 Manfaat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut.

1. Bidang kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat dapat mengetahui nilai akhir yang dicapai sesuai dengan dengan kinerja yang telah dijalankan.
2. Bidang kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dicapai sesuai indeks yang dihasilkan untuk kinerja-kinerja kedepannya agar memiliki kinerja yang lebih efektif.

I.6 Batasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan dan asumsi yang ditujukan agar penelitian lebih terarah dan terfokus pada permasalan yang dibahas. Berikut merupakan batasan yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada bidang kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

2. Responden penelitian ini dibatasi pada pekerja di sektor BPBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Jawa Barat.
3. Data pada penelitian ini menggunakan enam responden.

Selain batasan pada penelitian ini juga memiliki asumsi yang mendasari objek kajian ini, adapun asumsi penelitiannya sebagai berikut:

1. Indeks kinerja pada bidang kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat ini hanya mempertimbangkan empat aspek yaitu, peneriman manfaat, keuangan, proses bisnis interlan, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

I.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini diuraikan dengan menggunakan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum mengenai perancangan yang sedang dilakukan. Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini mejelaskan mengenai latar belakang penugasan, alternatif solusi, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian dan asumsi, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil yang bersumber dari buku/hasil penelitian/referansi lainnya sebagai acuan penulisan laporan ini.

Bab III Metodologi Penyelesaian Masalah

Pada bab ini membahas mengenai pemaparan metode, konsep, atau kerangka kerja yang telah dipilih pada bab Tinjauan Pustaka. Metode yang digunakan yaitu *Analytical Hierarchi Process* (AHP).

Bab IV Perancangan Sistem Terintegrasi

Pada bab ini mencangkup pengumpulan dan pengolahan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat untuk mendukung penelitian ini. Pengumpulan data pengolahan data dapat dilakukan dengan memakai metode yang terkonsep pada Bab III.

Bab V Analisa Hasil dan Evaluasi

Pada bab ini menyajikan analisis mengenai hasil penelitian yang dilakukan pada Bab IV dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil tersebut. Analisis yang dilakukan yaitu mengenai model indeks kinerja yang di dapat dengan menggunakan metode *Hierarchi Process* (AHP).

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi mengenai kesimupulan dan analisis pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan dan juga memberikan saran berupa pendapat yang diharapkan dapat meningkatkan performansi dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat.